BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Sesuai dengan pengertian tersebut, suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (teori) tentang masalah yang berkaitan, tidak selalu tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan. Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian.

Tinjauan pustaka dimulai dari Landasan Teori Umum (*Grand Theory*), berupa Ilmu Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan Teori Antara (*Middle Range Theory*) yang terdiri dari Kerjasama Internasional dan Ekonomi Politik Internasional. *Middle Range Theory* tersebut tidak lain merupakan induk keilmuan dari Teori Aplikasi (*Applied Theory*) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kerjasama Bilateral dan Perekonomian Nasional.

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menjelaskan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar"(Perwita & Yani,2005: 3-4).

Dalam pengertiannya Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Terdapat alasan kuat yang diutarakan oleh Jackson dan Sorensen mengapa kita sebaiknya mempelajari Hubungan Internasional.

> "Adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau Negara – Negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama – sama Negara – Negara tersebut membentuk system internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson & Sorensen,2009:2).

Hubungan internasional merupakan hubungan antarnegara atau antarindividu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Hubungan internasional itu sendiri terjadi karena dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa semua negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan akan selalu membutuhkan negara lain.

Hubungan internasional tidak selalu terjadi karena adanya persahabatan dan kerjasama, melainkan juga permusuhan, persengketaan bahkan peperangan.

Robert Jackson dan Georg Sorensen mengemukakan bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasonal, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2009 : 34).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial,

lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005 : 34).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita&Yani, 2005: 34).

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti,2000:362-363).

Suatu kerjasama internasional terjadi karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Kartasasmita,2001:19).

Selain faktor-faktor diatas, masih ada faktor yang turut mempengaruhi kerjasama internasional, yaitu adanya perbedaan ideology, ekonomi, cultural, luas daerah, kepadatan penduduk, system pemerintahan dan lain-lain (Kartasasmita,2001: 22-27).

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional :

Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. (Sugiono, 2006: 6).

2.1.3 Kerjasama Bilateral

Interaksi internasional merupakan bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa setiap negara didunia ini akan melakukan interaksi antar negara. Interaksi ini merupakan awal dari terciptanya kerjasama yang dilakukan baik oleh sesama individu, kelompok bahkan negara. Interaksi tidak hanya awal mula dari terjadinya kerjasama tetapi bisa menjadi awal mula terjadinya perang atau permasalahan antara dua negara atau lebih. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy,2002:127).

> “Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan

> keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (2002:15-16).

Dari definisi tersebut bahwa kerjasama bilateral merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mempererat hubungan persahabatan antar kedua negara.

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (Perwita dan Yani, 2005:28).

Dalam proses Hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu:

a. Memelihara kepentingan nasional
b. Memelihara perdamaian
c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005:29).

Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliput proses :

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa (Perwita & Yani,2005:42)

Hubungan bilateral yang dijalin oleh dua negara tentunya memilki sifat dari sasaran yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan beberapa peluang dan

tantangan yang akan dihadapi. Hal tersebut sepatutnya lebih cenderung pada peluang keuntungan yang akan diberikan dalam pelaksanaan kerjasama yang dijalin, karena peluang menjadi salah satu faktor sukses atau gagalnya suatu kerjasama.

2.1.4 Ekonomi Politik Internasional

Pada dasarnya ekonomi dan politik saling berkaitan satu sama lain. Dimana ada ekonomi pasti ada politik, begitu juga sebaliknya. Ekonomi politik adalah disiplin intelektual yang menyelidiki hubungan antara ekonomi dan politik. Pemikiran ekonomi politik telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi. Fenomena itu sangat kuat baik di negara maju maupun negara berkembang.

Secara umum kajian ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu harus dipahami bahwa pendekatan ini meletakan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, artinya bahwa instrument-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisa dengan mempergunakan setting politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi.

Secara umum ekonomi-politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional. Ekonomi-politik internasional secara sederhana dapat pula diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. Menurut Robert Gilpin yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional mendefinisikan, bahwa ekonomi-politik adalah dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (Perwita & Yani, 2005:76)

> "Secara umum ekonomi-politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam system internasional. Pengkajian ekonomipolitik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin ekonomi dan politik, misalnya masalah-masalah dalam isu perdagangan internasional, moneter, dan pembangunan ekonomi "(Gilpin,1987:3).

Terdapat juga tiga isu ekonomi-politik internasional yang penting dan berkaitan dalam beberapa tahun belakangan ini:

1. Penyebaran dan intensifikasi semua jenis hubungan ekonomi diantara negara-negara
2. Tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam proses globalisasi ekonomi
3. Bagaimana kita seharusnya memandang relatif pentingnya politik dan ekonomi (Jackson&Sorensen, 2009:77).

Pada saat ini negara-negara mencoba membentuk dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dapat memelihara dan melindungi stabilitas perekonomian internasional dimana negara-negara semakin bergantungan. Hal itu

biasanya menimbulkan sejumlah kebijakan ekonomi yang secara tepat dapat menghadapi pasar internasional, dengan kebijakan ekonomi negara lain, dengan penanaman modal asing, dengan nilai tukar asing, dengan perdagangan internasional, dengan komunikasi dan transportasi internasional, dan dengan hubungan ekonomi internasional lainnya yang mempengaruhi kekayaan dan kesejahteraan nasional.

2.1.5 Perekonomian Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari perekonomian adalah tindakan (aturan atau cara) berkonomi (menjalankan suatu usaha berdasarkan teori-teori ekonomi). Sedangkan arti dari kata nasional adalah bersifat kebangsaan atau meliputi suatu bangsa. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomia nasional adalah suatu tindakan atau cara berekonomi yang diambil oleh suatu negara agar dapat mencapai kepentingan nasional bangsanya.

> "Sebuah perekonomian nasional mengacu kepada perekonomian seluruh negara atau dunia. Perekonomian nasional itu sendiri termasuk sumber daya keuangan dan manajemen. Hal ini meliputi nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara" (http://www.ask.com/world-view/national-economy-94709838f91b4e2c diakses pada 09 April 2016 pada 00:30).

Dalam kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi disuatu negara menunjukan peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara. Peningkatan ini dapat dilihat dengan bertambahnya produksi industry, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya produksi barang modal dan bertambhanya sektor jasa. Setiap negara memiliki perekonomian nasional yang berbeda-beda karena setiap negara mempunyai tindakan atau cara masing-masing dalam melakukan kegiatan

berekonomi. Tindakan atau cara itulah yang akan menentukan bagaimana kondisi perekonomian disuatu negara.

2.1.5.1 Produk Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP)

Perekonomian suatu negara memiliki kaitan yang erat dengan berbagai substansi di dalam negara. Substansi tersebut meliputi aspek-aspek penting seperti produksi dan konsumsi, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak pemerintah. Aspek-aspek tersebut yang kemudian dijadikan acuan dalam penghitungan suatu tingkat perekonomian suatu negara. Sedangakan untuk lebih lanjut, indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat perekonomian negara adalah *Gross Domestic Product* atau GDP. GDP adalah standar yang digunakan dengan memasukkan segala aspek tersebut dalam penghitungannya. GDP dapat diartikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah negara pada periode tertentu (Mankiw,2006 :5-6).

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada didalam wilayah hukum suatu negara, tanpa memperhatikan apakah penduduk tersebut warga negara dari negara yang bersangkutan ataupun warga negara dari negara yang tidak bersangkutan. Pengertian ini sering disebut sebagai konsep kewilayahan (Suparmoko,2014:29).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya diukur dengan mempergunakan data tentang Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian di negara tersebut.

Didalam buku ekonomi politik internasional T May Rudi , menjelaskan bawha, GNP atau PNB merupakan penjumlahan keseluruhan produksi dan nilai perolehan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, termasuk dari usaha investasi diluar negeri. Sedangkan GDP atau PDB adalah keseluruhan produksi domestik(dalam negeri) satu negara, termasuk yang diproduksi oleh PMA (penanaman modal asing) yang hasil keuntungannya tidak sepenuhnya ikut dinikmati olerh penduduk. Oleh karena itu bagi negara kaya dan industi maju biasanya GNP (PNB) lebih basar nilainya dibandingkan GDP (PNB) berhubungan cukup banyak investasinya diluar negri (perusahaan transnasional/multinasional). Sebaliknya bagi negara miskin atau negara berkembang,GDP bisa lebih besar dibandingkan GDPnya (Rudi, 2007: 41).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*).

Setiap aktor negara pastinya akan melakukan interaksi dengan aktor negara maupun non-aktor negara lainnya agar dapat menambah pertemanan dan koneksi dengan negara lain dan selain itu sebagi bentuk eksistensi dalam hubungan internasional. Dengan terjadinya hubungan internasional itulah akan menimbulkan rasa saling ketergantungan antara satu negara dengan lainnya karena bertambah

banyaknya keinginan atau kebutuhan manusia dan kepentingan nasional yang ingin dicapai .

Dari hal tersebutlah yang akhirnya akan memicu terjadinya suatu kerjasama diantara para aktor negara. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan yang merupakan bentuk dari hubungan internasional yang dimana adanya interaksi antara aktor negara yang telah melewati batas-batas negara yang didasari oleh rasa saling ketergantungan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya masing-masing.

Dari hubungan internasional itulah maka timbul kerjasama internasional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara yang tidak dapat tercapai didalam negerinya sendiri. Dalam melaksanakan kerjasama internasional setiap negara pastinya memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Dengan adanya kerjasama internasional diharapkan dapat terpenuhinya kepentingan nasional yang ingin dicapai dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Adanya kerjasama internasional ini memiliki berbagai faktor seperti yang telah dijelaskan oleh Kartasasmita. Yang pada intinya kerjasama internasional akan terjalin bila negara tersebut dinilai mempunyai daya tariknya masing-masing dan adanya kesadaran bahwa dibutuhkannya kerjasama agar tercapainya kepentingan nasional suatu negara.Terdapat empat macam kerjasama yang dapat dilakukan antara lain : kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, kerjasama regional dan kerjasama internasional.

Indonesia dan Korea Selatan merupakan salah satu negara yang banyak melakukan kerjasama bilateral diberbagai macam bidang seperti pada bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, budaya, dan lain lain. Kerjasama bilateral yang sedang hangat dan gencar dilakukan antara Indonesia dengan Korea Selatan salah satunya adalah kerjasama dibidang ekonomi. Indonesia yang dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan memiliki budaya yang unik ini merupakan negara yang memiliki banyak peluang untuk melakukan kerjasama. Sedangkan Korea Selatan merupakan salah satu negara dikawasan Asia yang termasuk negara yang maju dan terkenal dengan kecanggihan teknologi dan komunikasinya. Kedua negara tersebut mempunyai nilai lebih masing-masing sehingga kedua negara sepakat melakukan kerjasama diberbagai bidang.

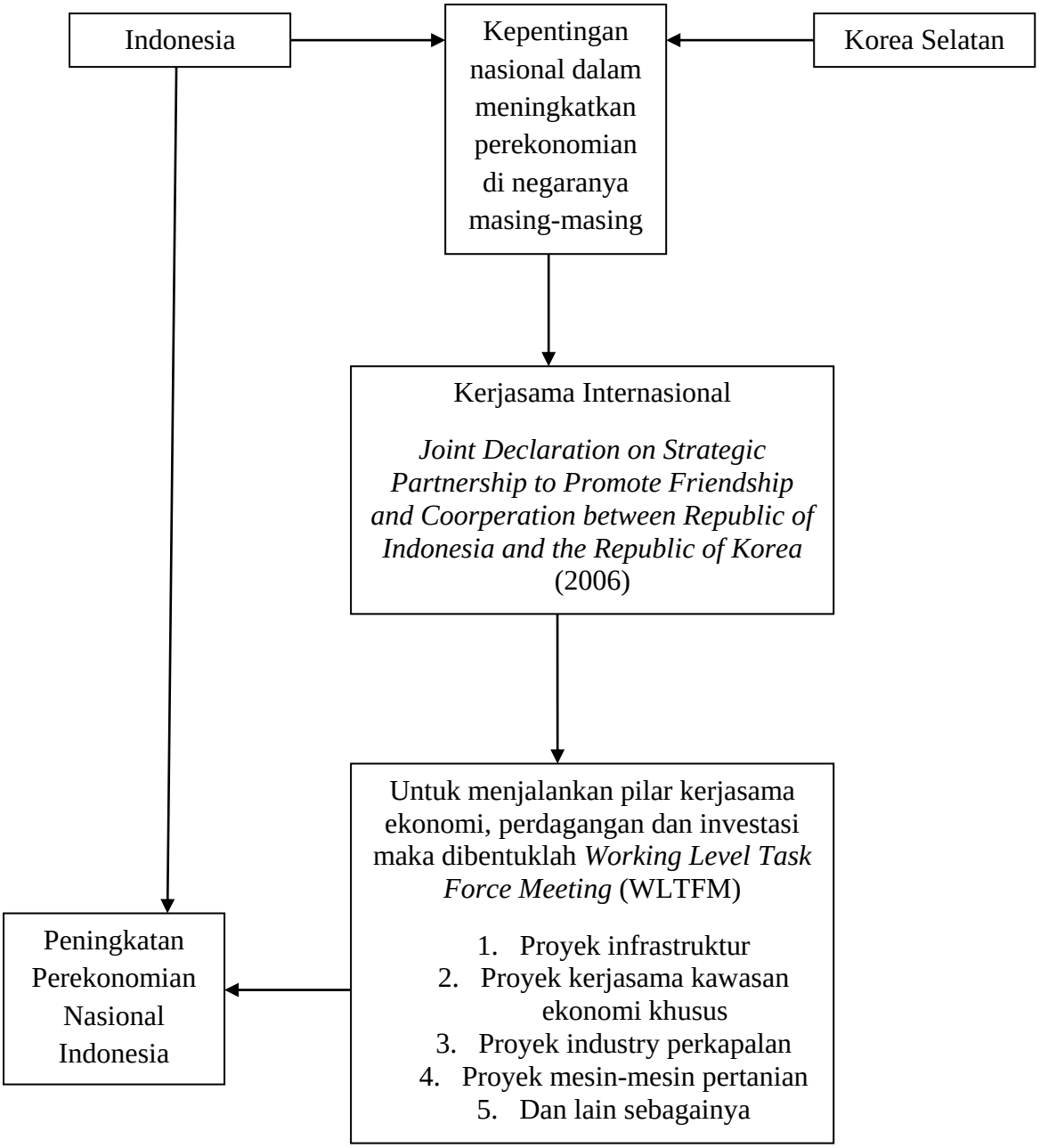
Kedua negara ini memutuskan untuk memasuki hubungan bilateral yang semakin strategis dengan ditandatanganinya "*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Coorperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea*". *Joint Declaration* tersebut memiliki 3 pilar yaitu : kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, kerjsama social budaya.

Untuk mewujudkan pilar kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, maka kedua negara memutuskan untuk membentuk *Indonesia – Korea Joint Task Force on Economic Cooperation* (JTF-EC) sejak tahun 2007 dan telah melakukan pertemuan tahunan sejak saat itu. Lalu pada tahun 2011, Indonesia – Korea JTF-EC direvitalisasi menjadi *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM). WLTFM ini selalu melakukan pertemuan tahunan untuk membahas tentang

akomodasi perkembangan yang signifikan dalam kerjasama ekonomi kedua negara.

Pertemuan rutin yang selalu diadakan oleh kedua negara ini didalamnya membahas tentang pengembangan proyek-proyek yang dilakukan oleh kedua negara untuk mempertegas dan meningkatakan kemitraan ekonomi. Pengembangan proyek yang dibahas dalam pertemuan rutin ini antara lain proyek infrastruktur, proyek kerjasama kawasan ekonomi khusus, proyek industry perkapalan, proyek mesin-mesin pertanian, dan sebagainya.

Dengan terjalinnya kerjasama bilateral pada bidang ekonomi ini, maka diharapakan kedua negara dapat mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin agar kepentingan nasionalnya dapat tercapai dengan sangat baik. Salah satunya adalah meningkatnya perekonomian nasional di Indonesia. Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut :



Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran